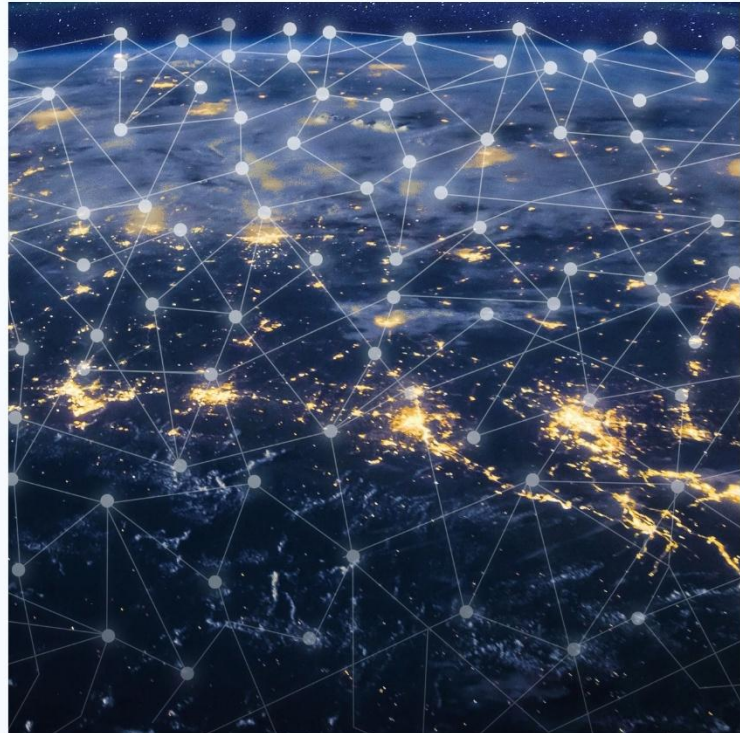




20
25



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Teknologi
Informasi Penanaman Modal

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Unit Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 disusun sebagai wujud komitmen Unit Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pencapaian target dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai realisasi capaian Indikator Kinerja utama dan pendukung, yang meliputi Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Teknologi Informasi, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, serta Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Deputy Bidang Teknologi Informasi, yang mencakup capaian indikator kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi sarana transparansi dan pertanggungjawaban kinerja yang informatif bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus berfungsi sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2026
Plt. Deputy Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal

Siti Romayah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	VI
BAB 1. PENDAHULUAN	8
1.1 LATAR BELAKANG	8
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.4 ASPEK STRATEGIS.....	12
1.5 ISU STRATEGIS	13
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN	14
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. RENCANA STRATEGIS	15
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
3.2 REALISASI ANGGARAN	26
3.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	27
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	28
BAB 4. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	31
4.1. TRANSFORMASI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA.....	31
4.2. TRANSFORMASI SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN	31
4.3. TRANSFORMASI LAYANAN DATA DAN INFORMASI	33
BAB 5. PENUTUP	34
5.1 KESIMPULAN	34
5.2 SARAN	34
LAMPIRAN I	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal ..	11
Tabel 2.	Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025.....	15
Tabel 3.	Kegiatan dan Pagu Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025	16
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.....	17
Tabel 5.	Kategorisasi Kinerja.....	18
Tabel 6.	Target dan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	18
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal.....	20
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi.....	21
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	22
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.....	24
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	25
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	26
Tabel 13.	Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2022-2025	27
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Berdasarkan Kegiatan.....	27
Tabel 15.	Realisasi Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja	27
Tabel 16.	Efisiensi Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.....9

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029. Secara umum, capaian kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 belum sepenuhnya optimal namun telah menunjukkan progres positif sebagai fondasi awal pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai 3 (tiga) Sasaran Program dengan 6 (enam) Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025. Capaian kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 secara keseluruhan termasuk berhasil dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 85,34 (Baik).
2. Dari 3 (tiga) Sasaran Program, terdapat 2 (dua) sasaran yang nilainya lebih dari 100% yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal (101,47%, Kategori Sangat Baik) dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (101,07%, kategori Sangat Baik), dan 1 (satu) sasaran masih di bawah 100% yaitu Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal (63,19%, kategori Butuh Perbaikan).
3. Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2025, Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mengelola anggaran sebesar Rp157.115.015.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus lima belas juta lima belas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp125.146.975.692 (seratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau mencapai 79,65%.

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal periode selanjutnya, beberapa permasalahan dan upaya tindak lanjut dalam pencapaian kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada periode selanjutnya antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara seluruh unit pada Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dalam pelaksanaan program strategis di lingkup Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.
2. Melakukan monitoring, pengawalan, dan koordinasi dengan Inspektorat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dapat digunakan untuk

- memperbaiki kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal yang masih perlu ditingkatkan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran, setiap unit kerja harus disiplin melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya. Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala juga perlu dilakukan.
 4. Capaian kinerja Tahun 2025 akan menjadi dasar untuk memutakhirkan target kinerja di tahun 2026 dan masa yang akan datang.

Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berupaya perbaikan dalam upaya merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penganggung jawab Indikator Kinerja dan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kedeputan Teknologi Informasi Penanaman Modal akan terus melakukan monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2025 merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal beserta penggunaan anggaran yang diberikan. Proses penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025, dijelaskan tentang pengukuran dan evaluasi kinerja berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sekaligus sebagai sarana penyampaian informasi kinerja kepada publik serta bahan evaluasi untuk mendukung perbaikan kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus berupaya melakukan reformasi dalam aspek kelembagaan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat serta mampu mengadaptasi perubahan regulasi. Untuk itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah melakukan restrukturisasi organisasi, salah satunya dengan dibentuknya Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Badan dan dipimpin oleh Deputy.

Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

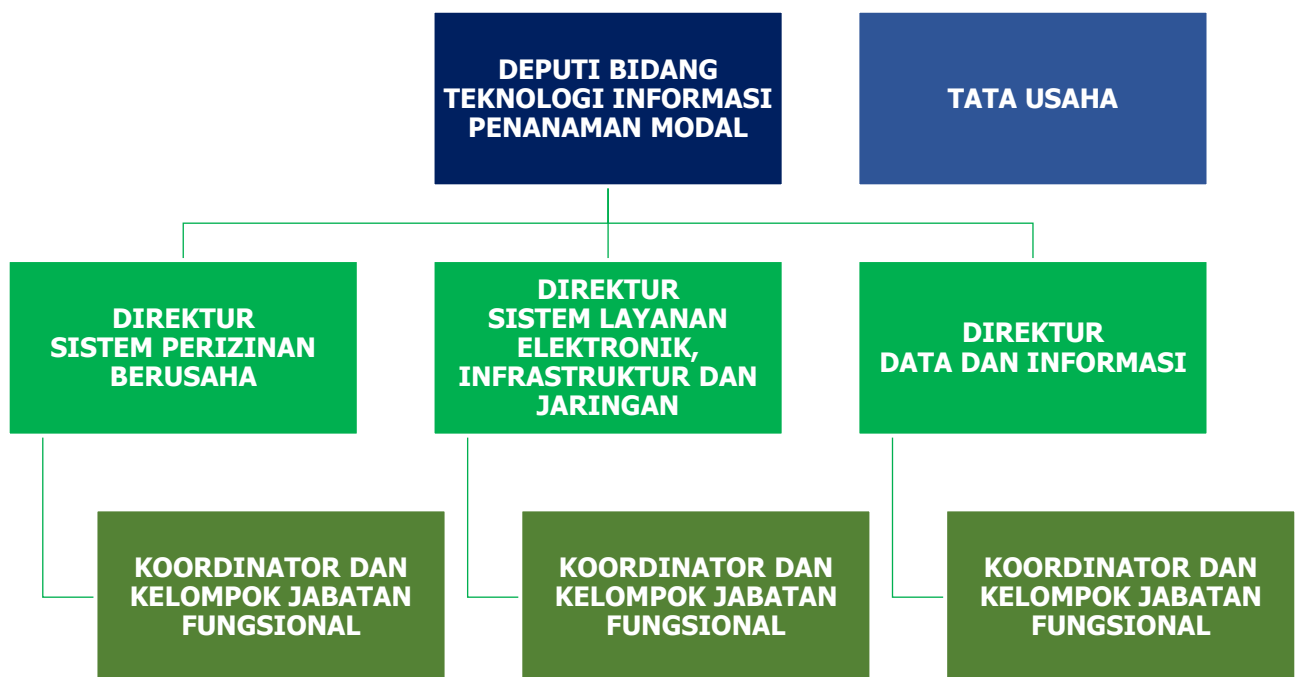
- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang teknologi informasi penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Badan.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Deputi dan membawahi 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) bagian, yaitu

- a. Direktorat Sistem Perizinan Berusaha;
- b. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan;
- c. Direktorat Data dan Informasi;
- d. Bagian Tata Usaha.

sebagaimana tergambar pada bagan organisasi berikut ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Direktorat adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Sistem Perizinan Berusaha

Direktorat Sistem Perizinan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, dan interoperabilitas sistem perizinan berusaha secara elektronik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem Perizinan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola, pengembangan, kolaborasi, interoperabilitas, manajemen di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, kolaborasi, interoperabilitas, manajemen sistem perizinan berusaha secara elektronik;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, keamanan, dan operasional sistem informasi penanaman modal dan hilirisasi;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem perizinan berusaha secara elektronik; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

2. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan

Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, dan interoperabilitas sistem layanan elektronik, serta infrastruktur dan jaringan. Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, layanan pengguna dan dukungan teknis, manajemen sistem layanan elektronik, serta infrastruktur dan jaringan serta transformasi digital;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan, interoperabilitas, layanan pengguna dan dukungan teknis, manajemen sistem layanan elektronik, serta infrastruktur dan jaringan serta transformasi digital;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital; dan

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

3. Direktorat Data dan Informasi

Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan tata kelola, pengumpulan, analisis, pengelolaan, pelaporan, penyajian, serta penyebarluasan data dan informasi penanaman modal dan hilirisasi. Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengumpulan, analisis, pengelolaan, pelaporan, penyajian, kolaborasi, integritas dan penyebarluasan data dan informasi penanaman modal;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, manajemen risiko, pengumpulan, analisis, pengelolaan, pelaporan, penyajian, kolaborasi, integritas dan penyebarluasan data dan informasi penanaman modal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi pengolahan data penanaman modal;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan, analisis, dan penyajian data penanaman modal dan hilirisasi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi pengolahan data penanaman modal;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Adapun dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal terdiri atas:

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

No.	Jabatan	Orang
1.	Deputi (Eselon I)	1 orang
2.	Direktur (Eselon II)	2 orang
3.	Kepala Bagian Tata Usaha TI	1 orang
4.	Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari	
	a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	3 orang
	b. Pranata Komputer Ahli Madya	2 orang
	c. Statistisi Ahli Madya	2 orang
	d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	14 orang
	e. Pranata Komputer Ahli Muda	7 orang
	f. Statistisi Ahli Muda	1 orang
	g. Pranata Komputer Ahli Pertama	12 orang
	h. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	4 orang

No.	Jabatan	Orang
	i Statistisi Ahli Pertama	9 orang
	i PPPK Pranata Komputer Ahli Pertama	7 orang
	j PPPK Statistisi Ahli Pertama	3 orang
	k PPPK Pranata Komputer Penyelia	1 orang
	l PPPK Pranata Komputer Mahir	3 orang
	m PPPK Pranata Komputer Terampil	5 orang
5.	Staf Pendukung	4 orang

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dimaksudkan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai capaian kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi penanaman modal. Laporan ini menjadi sarana untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, sasaran, serta target kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan kinerja disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dalam pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada para pemangku kepentingan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal adalah untuk menyediakan informasi kinerja yang komprehensif sebagai dasar dalam penetapan prioritas, penyusunan rencana kerja, serta pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Laporan ini diharapkan dapat mendukung proses perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang teknologi informasi penanaman modal secara berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan dalam mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja organisasi agar tercapai efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang optimal dalam mendukung tujuan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

1.4 ASPEK STRATEGIS

Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal memiliki potensi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Tahun 2024–2028 sesuai dengan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 176 tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2024-2028 menjadi landasan kuat untuk memastikan integrasi pengembangan aplikasi, data, infrastruktur, dan layanan digital secara terarah dan berkelanjutan. Arsitektur

SPBE tersebut memungkinkan penyelarasan inisiatif jangka pendek, menengah, dan panjang dalam rangka mewujudkan layanan penanaman modal yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Potensi lainnya terletak pada transformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui penguatan dan pengembangan sistem OSS. Upaya peningkatan kapasitas infrastruktur, termasuk pemanfaatan komputasi awan (*cloud*), revitalisasi data center dan command center, serta pengelolaan command center secara terpusat, memberikan peluang besar untuk meningkatkan keandalan layanan perizinan dan pengawasan investasi secara nasional. Transformasi ini mendukung kelancaran penerbitan perizinan, pelaporan LKPM, serta monitoring realisasi investasi secara lebih responsif.

Selain itu, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal memiliki potensi besar dalam transformasi layanan data dan informasi penanaman modal. Penerapan tata kelola data, pengembangan dashboard dan Business Intelligence, serta pemanfaatan *advanced analytics* dan teknologi kecerdasan artifisial membuka peluang peningkatan kualitas analisis, pengawasan, dan perumusan kebijakan investasi berbasis data. Optimalisasi layanan data, baik secara daring maupun luring, juga memperkuat peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai penyedia data investasi yang kredibel dan terpercaya bagi pemangku kepentingan.

1.5 ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, antara lain:

1. Dinamika regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tata kelola data menuntut sistem dukungan manajemen yang adaptif, namun keterbatasan fleksibilitas perencanaan, penganggaran, dan integrasi sistem pengambilan keputusan berpotensi menghambat respons kebijakan dan keputusan strategis.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, termasuk kapasitas infrastruktur (*server dan storage*), regulasi pengadaan yang kurang fleksibel, serta ketergantungan pada pihak ketiga, berdampak pada stabilitas layanan, integrasi sistem, dan kepuasan pengguna.
3. Belum optimalnya penerapan standar layanan teknologi informasi (seperti manajemen insiden, perubahan, dan permintaan layanan) berpotensi menghambat konsistensi, kualitas, dan orientasi layanan kepada pengguna.
4. Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia teknologi informasi (SDM TI), baik di pusat maupun daerah, mencakup keterbatasan jumlah dan kompetensi, resistensi aparatur daerah, serta keterbatasan pelatihan dan dukungan teknis, yang berdampak pada efektivitas implementasi OSS dan kualitas layanan perizinan.

5. Keterbatasan dukungan anggaran teknologi informasi, khususnya pada bidang data dan informasi, belum sebanding dengan peran strategis TI dan OSS RBA sebagai tulang punggung kebijakan perizinan nasional.
6. Modernisasi OSS RBA menuju *New OSS* RBA merupakan kebutuhan mendesak, mencakup pembaruan arsitektur sistem, integrasi lintas K/L/D, peningkatan pengalaman pengguna, pemanfaatan data dan analitik, serta penguatan keamanan dan keandalan sistem.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Deputy Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara rinci, sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Ikhtisar Eksekutif
Pada bagian ini berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Deputy Teknologi Informasi Penanaman Modal selama tahun 2025 yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.
- b. Bab I Pendahuluan
Bab ini menyampaikan secara ringkas mengenai latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika pelaporan;
- c. Bab II Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025;
- d. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab ini menggambarkan capaian kinerja serta realisasi anggaran;
- e. Bab IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Bab ini menguraikan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2025 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Deputy Teknologi Informasi Penanaman Modal;
- f. Bab V Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Deputy Teknologi Informasi Penanaman Modal serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Deputy Teknologi Informasi Penanaman Modal untuk meningkatkan kinerja Deputy Teknologi Informasi Penanaman Modal.
- g. Bab VI Lampiran
Berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2. 1. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung sasaran program pembangunan nasional Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, maka pada Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menetapkan tiga sasaran program yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan arah pelaksanaan program di lingkungan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Sasaran dirumuskan untuk memperkuat nilai tambah investasi dan memastikan tata kelola kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Sasaran program yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal meliputi:

1. Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal (SP-1), yang diukur melalui indikator Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal (IK-1);
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal (SP-2), yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi (IK-2);
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (SP-3), yang diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (IK-3), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (IK-4), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (IK-5), dan Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (IK-6).

Sasaran Program dan target Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
SP-1	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal		
1	Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal	%	59
SP-2	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal		
2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi	Indeks	3,41

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target
SP-3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal		
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi	Predikat/Nilai	80
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Nilai	75
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Nilai	87,1
6	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi	%	5

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2025, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mengelola anggaran sebesar Rp157.115.015.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus lima belas juta lima belas ribu rupiah), yang dilaksanakan dalam kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Kegiatan dan Pagu Anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Direktorat Sistem Perizinan Berusaha	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.720.139.000
2	Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	70.487.006.000
3	Direktorat Data dan Informasi	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	5.907.870.000
Total Anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal			157.115.015.000

Pada Tahun 2025, terdapat revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu yang dikelola Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal semula Rp77.781.812.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi Rp157.115.015.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus lima belas juta lima belas ribu rupiah) yang disebabkan adanya realokasi anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2. 2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 memuat Sasaran Program, Indikator Kinerja dan target yang terkait dengan tugas fungsi Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal	1	Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)	59
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal	2	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi (Indeks)	3,41
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Teknologi Informasi (predikat/nilai)	80
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	75
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	87,1
		6	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Teknologi Informasi (%)	5

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran program dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 5. Kategorisasi Kinerja

No.	Nilai	Kode	Kategori
1	100 – keatas	Biru	Istimewa
2	81 – 100	Hijau	Baik
3	61 – 80	Kuning	Butuh Perbaikan
4	21 – 60	Oranye	Kurang
5	0 – 20	Merah	Sangat Kurang

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja organisasi Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Direktorat di lingkungan Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal yang didasarkan atas perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, yang dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik, baik setiap bulan, triwulan/semester/tahunan sesuai dengan karakteristik Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dilakukan melalui Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Berdampak (SIMANTAB) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Proses penghitungan kinerja dilakukan dengan menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan dengan mengukur pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 adalah sebesar 85,34 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. Target dan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal	1 Persentase penyelesaian tata kelola program strategis peta jalan teknologi informasi penanaman modal	59,00	37,28	63,19%	63,19%	10,00%	56,87%
2	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal	2 Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi (indeks)	3,41	3,46	101,47%	101,47%	10,00%	91,32%
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup deputy bidang teknologi informasi penanaman modal	3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00	76,40	95,50%	95,50%	10,00%	85,95%
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	75,00	75,00	100,00%	100,00%	10,00%	90,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	87,10	86,04	98,78%	98,78%	10,00%	88,90%
		6 Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)	5,00	0,00	110,00%	110,00%	10,00%	99,00%
						Total Capaian PK		512,05%
						Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK		85,34%
						Predikat PKO		BAIK

Penjelasan capaian target kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Program (SP-1) Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal

Nilai capaian Sasaran Program ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut:

IK-1: Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal

Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian program-program strategis yang tercantum dalam Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 176 Tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2024-2028. Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Strategis
Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal

Sasaran Program 1						
Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 1						
Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal						
2024		2025				Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)	
N/A	N/A	59%	37,28%	63,19	N/A	Butuh Perbaikan

Pada Tahun 2025, realisasi Persentase Penyelesaian Program Strategis Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal mencapai 37,28% dari target 59%, sehingga pencapaian di tahun 2025 sebesar 63,19%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi inisiatif strategis telah berjalan, meskipun belum seluruhnya dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga belum terdapat data capaian pada Tahun 2024 sebagai pembandingan.

Belum optimalnya capaian indikator ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada keterbatasan alokasi sumber daya untuk percepatan implementasi seluruh inisiatif dalam peta jalan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian inisiatif mengalami penundaan atau belum dapat dilaksanakan, khususnya inisiatif yang membutuhkan dukungan anggaran signifikan, seperti pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan dan penyempurnaan aplikasi, penguatan keamanan informasi, serta penyediaan dukungan infrastruktur tambahan.

Target 59% yang ditetapkan pada Tahun 2025 merupakan bagian dari target jangka menengah sebesar 62% yang direncanakan untuk dicapai pada Tahun 2029. Dengan realisasi sebesar 37,28% pada Tahun 2025, capaian ini menunjukkan progres awal yang signifikan dalam mendukung pencapaian target jangka menengah tersebut, serta menjadi fondasi bagi percepatan implementasi inisiatif pada tahun-tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut:

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal akan melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, penguatan koordinasi lintas unit kerja, serta penjadwalan ulang inisiatif yang tertunda. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan implementasi Peta Jalan Teknologi Informasi Penanaman Modal tetap berjalan secara berkelanjutan, adaptif terhadap kebijakan efisiensi anggaran, dan selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Program (SP-2) Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal

Nilai capaian Sasaran Program ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut:

IK-2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi merupakan indeks yang diukur dengan menyelenggarakan survei ataupun menerima *feedback* kepuasan instansi/unit kerja. Indeks didapat dari rata-rata hasil survei Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Survei menggunakan pengukuran dengan Skala Likert yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap internal dan eksternal yang menerima Layanan Teknologi Informasi. Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi

Sasaran Program 2					
Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal					
Indikator Kinerja 2					
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi					
2024		2025			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
3,4	3,41	3,41	3,46	101,47	1,47
					Istimewa

Pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Teknologi Informasi mencapai nilai 3,46 dari target 3,41, dengan tingkat capaian sebesar 101,47%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan teknologi informasi yang diberikan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 3,41, nilai indeks kepuasan pengguna pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin atau tumbuh sebesar 1,47%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan teknologi informasi, baik dari aspek keandalan sistem, dukungan layanan, maupun responsivitas terhadap kebutuhan pengguna.

Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna pada Tahun 2025 telah mencapai nilai 3,46, yang berarti telah melampaui target jangka menengah Tahun 2029 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal sebesar 3,45. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas layanan teknologi informasi telah berjalan efektif dan berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah organisasi.

Rencana Tindak Lanjut:

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal akan berfokus pada upaya menjaga konsistensi kualitas layanan, melakukan inovasi layanan berbasis kebutuhan pengguna, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar tingkat kepuasan pengguna dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Sasaran Program (SP-3) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Nilai capaian Sasaran Program ini didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal; 2) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal; 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal; dan 4) Persentase Batas Tertinggi Nilai tTemuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal; dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

IK-3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian APIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Nilai ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian pada evaluasi atas implementasi AKIP, yakni perencanaan kinerja (29%), pengukuran kinerja (28%), pelaporan kinerja (17%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja (26%). Capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Sasaran Program 3					
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
Indikator Kinerja 3					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
2024		2025			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
80	74,6	80	76,4	95,5	2,41
					Baik

Pada Tahun 2025, Nilai Evaluasi AKIP Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mencapai 76,4 dari target 80, dengan tingkat capaian sebesar 95,5%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan penyempurnaan untuk mencapai target optimal. Belum tercapainya target Tahun 2025 dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses tindak lanjut atas hasil evaluasi AKIP, sehingga beberapa aspek penilaian belum memperoleh nilai maksimal.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 74,6, nilai AKIP Tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 2,41%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkungan Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Realisasi Tahun 2025 berada pada jalur yang searah dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2029 sebesar 80,4. Capaian ini menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi AKIP secara bertahap dan berkelanjutan.

Rencana Tindak Lanjut:

Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal akan memperkuat koordinasi dengan APIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta menyempurnakan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai rekomendasi evaluasi guna meningkatkan nilai AKIP pada tahun berikutnya.

IK-4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal adalah indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dua aspek penting yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas mengukur sejauh mana anggaran yang direncanakan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, sementara efisiensi mengukur sejauh mana anggaran tersebut dikelola secara optimal untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Penilaian terhadap NKPA membantu organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa perencanaan anggaran mendukung pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang wajar.

NKPA memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan anggaran, apakah anggaran yang dialokasikan dapat mencapai hasil yang diinginkan secara optimal dan apakah proses pengelolaan anggaran dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Sasaran Program 3					
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
Indikator Kinerja 4					
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
2024		2025			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
N/A	N/A	75	75	100	N/A
					Kategori
					Baik

Pada Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mencapai nilai 75 dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator NKPA merupakan indikator baru yang mulai diukur pada Tahun 2025, sehingga belum terdapat data pembandingan pada Tahun 2024. Realisasi Tahun 2025 menjadi dasar dalam pengukuran kinerja perencanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Realisasi NKPA Tahun 2025 telah mendekati target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 75,5. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target pada Rencana Strategis.

Rencana Tidak Lanjut:

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal akan berkoordinasi dengan BPPA agar dapat melakukan penyempurnaan perencanaan anggaran sehingga kualitas perencanaan semakin optimal.

IK-5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh negara untuk mengukur kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Besaran nilai IKPA ditentukan oleh: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, dan capaian output. Capaian indikator

kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Sasaran Program 3					
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
Indikator Kinerja 5					
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
2024		2025			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
86	87,1	87,1	86,04	98,78	-1,22
					Baik

Pada Tahun 2025, Nilai IKPA mencapai 86,04 dari target 87,10, dengan tingkat capaian sebesar 98,78%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 87,10, nilai IKPA Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,22%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan anggaran, termasuk penyesuaian kebijakan dan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2025. Namun, Realisasi IKPA Tahun 2025 masih relatif dekat dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2029 sebesar 87,50, sehingga tetap berada pada jalur pencapaian target jangka menengah.

Rencana Tindak Lanjut:

Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal akan berkoordinasi dengan BPPA dan Biro Umum dan Keuangan untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan guna menjaga stabilitas dan peningkatan nilai IKPA.

IK-6 Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Deputy Bidang Teknologi Informasi dibandingkan realisasi anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi tahun anggaran sebelumnya, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian indikator kinerja

Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Sasaran Program 3					
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
Indikator Kinerja 6					
Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal					
2024		2025			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
5	3,04	5%	0%	110	100
					Kategori
					Istimewa

Pada Tahun 2025, persentase batas tertinggi nilai temuan atas Laporan Keuangan Deputi Bidang Teknologi Informasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mencapai 0,00%, lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 5. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Deputi Bidang Teknologi Informasi telah disajikan secara wajar dan tidak terdapat nilai temuan yang berdampak terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 3,04%, kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dengan menurunnya persentase nilai temuan hingga mencapai 0,00%. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara, serta konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut:

Deputi Bidang Teknologi Informasi akan berkoordinasi dengan Inspektorat agar dapat mempertahankan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat mekanisme pengawasan internal guna menjaga kewajaran dan akuntabilitas laporan keuangan secara berkelanjutan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 adalah sebesar sebesar Rp157.115.015.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus lima belas juta lima belas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp125.146.975.692 (seratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau mencapai 79,65%. Realisasi anggaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal untuk periode 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2022-2025

No.	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2022	66.927.158.000	66.815.861.835	99,83	112.296.165	0,17
2	2023	94.195.709.000	94.009.680.906	99,80	186.028.094	0,20
3	2024	140.945.313.000	134.283.189.961	95,27	6.662.123.319	4,73
4	2025	157.115.015.000	125.146.975.692	79,65	31.968.039.308	20,35

Realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.720.139.000	53.062.968.819	65,74	27.657.170.181	34,26
Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	70.487.006.000	66.304.224.831	94,07	4.182.781.169	5,93
Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	5.907.870.000	5.779.782.042	97,83	128.087.958	2,17
Total	157.115.015.000	125.146.975.692	79,65	31.968.039.308	20,35

3.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan (unit kerja) yang mendukung sasaran program untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal	1 Persentase penyelesaian program strategis peta jalan teknologi informasi penanaman modal	104.482.856.000	88.522.286.255	84,72
2	Meningkatnya kualitas layanan	2 Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi	49.500.020.000	34.251.728.437	69,20

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)	
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		
	teknologi informasi penanaman modal					
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup deputy bidang teknologi informasi penanaman modal	3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	748.000.000	572.000.000	76,47
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	1.472.533.000	1.080.500.000	73,38
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	103.000.000	103.000.000	100,00
		6	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	808.606.000	617.461.000	76,36
Jumlah				157.115.015.000	125.146.975.692	79,65

3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS);
2. Data pagu anggaran; dan
3. Data realisasi anggaran.

Efisiensi anggaran terjadi jika sumber daya dikeluarkan melebihi capaian kinerja keluaran tertentu, maka efisiensi rendah. Sebaliknya, jika sumber daya yang dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja tertentu, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran

seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Efisiensi Anggaran Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Anggaran		Capaian (%)	Capaian IK (%)	Efisiensi (%)
				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal	1	Persentase penyelesaian program strategis peta jalan teknologi informasi penanaman modal	104.482.856.000	88.522.286.255	84,72	63,19	-21,53
2	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi	49.500.020.000	34.251.728.437	69,20	101,47	32,27
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup deputy bidang teknologi informasi penanaman modal	3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	748.000.000	572.000.000	76,47	95,50	19,03
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	1.472.533.000	1.080.500.000	73,38	100,00	26,62
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	103.000.000	103.000.000	100,00	98,78	-1,22
		6	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	808.606.000	617.461.000	76,36	110,00	33,64
Jumlah				157.115.015.000	125.146.975.692	79,65	94,82	15,17

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mencapai 15,17% yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp157.115.015.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus lima belas juta lima belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp125.146.975.692 (seratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 94,82%. Apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran secara

umum pencapaian sasaran Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal telah termasuk kategori efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.482.856.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp88.522.286.255 dengan persentase realisasi mencapai 84,72% dan NPS mencapai 63,19% atau terdapat inefisiensi anggaran sebesar 21,53%.
2. Sasaran Program “Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.500.020.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp34.251.728.437 dengan persentase realisasi mencapai 96,82% dan NPS mencapai 101,47% atau efisiensi anggaran telah mencapai sebesar 32,27%
3. Sasaran Program “Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup deputi bidang teknologi informasi penanaman modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.132.139.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp2.372.961.000 dengan persentase realisasi mencapai 75,76% dan NPS mencapai 101,07% atau efisiensi anggaran telah mencapai sebesar 19,52%.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran tidak terserap secara maksimal, sasaran kinerja yang ditetapkan tetap dapat dicapai pada dengan baik, sehingga secara umum telah tercapai efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB 4. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal telah melakukan beberapa inisiatif kegiatan perbaikan selama Tahun 2025 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara optimal dan berkesinambungan yang selaras dengan program kelembagaan. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi internal (Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM), arahan pimpinan, program reformasi birokrasi, dan reviu pengelolaan kinerja. Beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dijelaskan dalam subbab berikut ini.

4. 1. TRANSFORMASI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA

Pada tahun 2025, Direktorat Sistem Perizinan Berusaha telah melakukan beberapa upaya transformasi sistem perizinan berusaha di antaranya:

1. Mengadakan sesi transfer knowledge secara rutin agar penyebaran informasi antara semua SDM merata;
2. Melakukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan, pengembangan dan interoperabilitas sistem perizinan berusaha secara elektronik; dan
3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam sistem OSS berbasis risiko untuk semua sektor perizinan berusaha.

4. 2. TRANSFORMASI SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK, INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN

Upaya perbaikan dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan, antara lain:

1. Implementasi ISO 20000:2018 dan ISO 27001:2022

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan layanan teknologi informasi dan keamanan informasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melaksanakan kegiatan *surveillance* ISO 20000:2018 Sistem Manajemen Layanan TI (SMLTI) dan ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)) yang diaudit oleh auditor eksternal TUV SUD pada tanggal 15–16 Oktober 2025.

Ruang lingkup ISO 27001:2022 mencakup Aplikasi OSS, sementara ruang lingkup ISO 20000:2018 mencakup layanan TI yang diselenggarakan oleh Deputi TI, yang terdiri dari layanan email dan akses, layanan jaringan internet, layanan aplikasi administrasi pemerintahan, layanan aplikasi perizinan berusaha, serta layanan permintaan data. Berdasarkan hasil audit eksternal, Kementerian Investasi dan

Hilirisasi/BKPM telah memiliki fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan SMKI dan SMLTI, baik dari sisi kebijakan, prosedur, maupun pengendalian tingkat tinggi.

Capaian ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan) guna menjaga kesesuaian terhadap standar internasional serta meningkatkan keandalan, keamanan, dan kualitas layanan teknologi informasi secara berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan layanan penanaman modal.

2. Peningkatan Kapabilitas Manajemen Proyek dan Tata Kelola Teknologi Informasi

Selaras dengan semangat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 176 Tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia teknologi informasi melalui program pelatihan dan sertifikasi *Certified Associate in Project Management* (CAPM) serta penguatan tata kelola teknologi informasi melalui COBIT.

CAPM merupakan program pengembangan kompetensi di bidang manajemen proyek yang diselenggarakan berdasarkan standar global dari *Project Management Institute* (PMI). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pegawai dengan pemahaman dasar hingga menengah terkait prinsip, terminologi, proses, dan praktik terbaik (*best practices*) dalam manajemen proyek, mencakup area inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, serta penutupan proyek. Sementara training COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*) dilakukan untuk meningkatkan kompetensi di bidang tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA. Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai kerangka kerja COBIT yang mencakup prinsip, domain, tujuan tata kelola, proses, serta mekanisme pengendalian TI yang terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi.

Dengan dilakukannya training dan sertifikasi CAPM dan COBIT dapat meningkatkan konsistensi penerapan tata kelola TI dan manajemen proyek di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM karena pegawai memiliki acuan praktik yang sama (*common language*, standar proses, dan kontrol). Sementara itu, dampak langsung pada kinerja, yaitu kinerja individu lebih terukur melalui target berbasis hasil, seperti ketepatan waktu pencapaian keluaran, kepatuhan proses, kualitas dokumentasi, dan penyelesaian isu/risiko.

4. 3. TRANSFORMASI LAYANAN DATA DAN INFORMASI

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2025, Direktorat Data dan Informasi telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan terus mengikuti pelatihan dan seminar tentang Data dan Informasi, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
2. Menerapkan Tata Kelola Data untuk dapat meningkatkan transparansi serta mendukung program pemerintah dalam percepatan Investasi.
3. Melakukan evaluasi kebutuhan layanan data dalam rangka peningkatan kepuasan layanan data dan informasi.
4. Melaksanakan Inisiatif Strategis yaitu:
 - Peningkatan Penerapan Layanan;
 - Pengembangan Sistem Informasi Berkelanjutan;
 - Manajemen Pencadangan;
 - Implementasi Manajemen Insiden Keamanan Informasi Berkelanjutan;
 - Analisis dan Prediksi Data;
 - Dashboard Pelaporan dan Layanan Pengindeksan;
 - Optimalisasi Strategi Implementasi Manajemen Antarmuka Pemrograman Aplikasi (Manajemen API);
 - Penyusunan Prosedur Standar Operasional;
 - Implementasi Tata Kelola;
 - Implementasi Manajemen;
 - Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
 - Inovasi Proses Bisnis.

BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Program Tahun 2025, serta perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum capaian sasaran kinerja telah mendapatkan hasil yang baik, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap jajaran di lingkungan Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal termasuk berhasil dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Tahun 2025 adalah sebesar 85,34% dengan kategori Baik. Selama Tahun 2025, dari 6 (enam) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian lebih dari 100% (kategori "istimewa"), 3 (tiga) indikator dengan capaian di antara 90% sampai dengan 100% (kategori "baik"), dan 1 (satu) indikator dengan capaian 63,19% (kategori "butuh perbaikan").
2. Pada Tahun 2025, Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mengelola anggaran sebesar Rp157.115.015.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus lima belas juta lima belas ribu rupiah), dengan realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp125.146.975.692 (seratus dua puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau mencapai 79,65%.
3. Berbagai upaya dan alokasi dana yang telah direalisasikan selama Tahun 2025 menunjukkan pencapaian kinerja sangat baik. Hal ini ditandai dengan pencapaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 94,82% dengan tingkat efisiensi mencapai 15,17%.

Untuk mencapai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, telah dilakukan berbagai upaya yang mencakup penguatan koordinasi pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya sebagian indikator kinerja menjadi bahan perbaikan pada periode berikutnya. Ke depan, koordinasi dan sinergi dengan unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta pemangku kepentingan terkait akan ditingkatkan secara lebih intensif, mengingat pencapaian target indikator kinerja memerlukan keterlibatan dan kolaborasi seluruh pihak terkait.

5.2 SARAN

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka meningkatkan kinerja Deputy Bidang Teknologi

Informasi Penanaman Modal pada periode selanjutnya, beberapa permasalahan dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja berbasis teknologi informasi, melalui pemanfaatan sistem yang terintegrasi dan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi, guna memastikan ketercapaian target jangka menengah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja lintas unit.
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan teknologi informasi, dengan mengoptimalkan proses bisnis, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta memastikan konsistensi penerapan kebijakan dan standar layanan teknologi informasi guna mendukung efektivitas dan kepuasan pengguna.
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi kompetensi teknis maupun pemahaman tata kelola dan pengendalian, untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan teknologi informasi.
4. Peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern dan tindak lanjut hasil pengawasan, melalui penguatan koordinasi dengan unit pengawasan, perbaikan berkelanjutan atas temuan pemeriksaan, serta peningkatan kualitas data dan pengukuran kinerja, termasuk terhadap indikator kinerja yang baru diterapkan.
5. Optimalisasi pelaksanaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran, dengan penjadwalan kegiatan yang lebih realistis, penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran, serta monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala agar program strategis tetap berjalan sesuai prioritas.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Romayah**
Jabatan : **Pit. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan : **Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Pit. Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal



Siti Romayah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3,54
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman Modal	2	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi (indeks)	3,41
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)	80,00
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	75,00
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	87,10
		6	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%)	5,00

Program : Penanaman Modal dan Hilirisasi

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 77.781.812.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penanaman Modal dan Hilirisasi	77.781.812.000
Total Anggaran Tahun 2025		77.781.812.000

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama
Pit. Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal



Siti Romayah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL
(REVISI I)



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL

(REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Romayah**
Jabatan : **Pit. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan : **Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Pit. Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal



Siti Romayah

PK Revisi 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM
(REVISI 1)**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya efektivitas tata kelola teknologi informasi penanaman modal	1	Persentase penyelesaian program strategis peta jalan teknologi informasi penanaman modal	59,00
2	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi (indeks)	3,41
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup deputy bidang teknologi informasi penanaman modal	3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)	80,00
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	75,00
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (nilai)	87,10
		6	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Teknologi Informasi (%)	5,00

Program : Penanaman Modal dan Hilirisasi

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 157.115.015.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	80.720.139.000
2	Pengelolaan Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	70.487.006.000
3	Pengelolaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	5.907.870.000
Total Anggaran Tahun 2025		157.115.015.000

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama
Pit. Deputy Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal



Siti Romayah